

Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan Masyarakat Perhutanan Sosial pada SSF *Project* Indonesia

Putri Azka*, Dede Lilis Chaerowati

Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*putriazkaa31@gmail.com, dede.lilis@unisba.ac.id

Abstract. Strengthening of Social Forestry (SSF) Project Indonesia is one of the efforts to accelerate the Social Forestry Program through strengthening community capacity, institutions in managing forest resources sustainably, and strengthening Social Forestry regulations. In this case, SSF Project Indonesia involves Community Facilitators/Field Facilitators who are key in the mentoring process. However, there are certainly many obstacles faced by Field Facilitators in conducting communication approaches to convince local communities so that this research is interesting to study. This research aims to describe empowerment communication in community assistance in 5 SSF Project Indonesia work areas. The theory used is Community Empowerment Theory. This research uses qualitative research methods with a case study approach, as well as a constructivist paradigm. Data collection techniques were carried out by interview, non-participant observation, literature & documentation study. The research subjects were determined based on purposive sampling technique, namely the Directorate of PKPS, SSF Project Indonesia Team Leader, and Field Facilitators. Data analysis techniques used from Miles & Huberman are data reduction, data presentation, & conclusion drawing/verification. The data validity test in this research is source triangulation.

Keywords: *Community Empowerment Communication, Field Facilitator, SSF Project Indonesia.*

Abstrak. Strengthening of Social Forestry (SSF) Project Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mempercepat Program Perhutanan Sosial melalui penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari, serta memperkuat regulasi Perhutanan Sosial. Dalam hal ini, SSF Project Indonesia melibatkan Pendamping Masyarakat/Field Facilitator yang menjadi kunci dalam proses pendampingan. Namun, tentunya banyak kendala yang dihadapi oleh para Pendamping Masyarakat dalam melakukan pendekatan komunikasi untuk meyakinkan masyarakat setempat sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi pemberdayaan dalam pendampingan masyarakat di 5 areal kerja SSF Project Indonesia. Teori yang digunakan Teori Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta paradigma konstruktivis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka & dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling, yakni pihak Direktorat PKPS, Team Leader SSF Project Indonesia, dan Pendamping Masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan dari Miles & Huberman berupa reduksi data, sajian data, & penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi sumber.

Kata Kunci: *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Masyarakat, SSF Project Indonesia.*

A. Pendahuluan

Perhutanan Sosial adalah salah satu program nasional yang bertujuan untuk memberikan hak akses kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan negara. Melalui program ini, pemerintah telah menargetkan guna memberikan hak akses kelola hutan seluas 12,7 juta hektar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2021, tercatat angka penduduk miskin mencapai 9,66% atau setara dengan 25,67 juta jiwa, dan dari data tersebut sekitar 36% berada di wilayah sekitar hutan. Sementara laporan the MC Kinsey Global Institute (2017) bahwa 50% pekerjaan yang ada terdapat pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan melibatkan 328,9 juta pekerja. Dari data-data tersebut, diharapkan Program Perhutanan Sosial dapat menjawab tantangan pembangunan dalam menambah serapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah.

Dalam rangka untuk mendukung, membantu, dan mempercepat pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Indonesia melalui penguatan kapasitas masyarakat, organisasi maupun kelembagaan untuk mengimplementasikan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan terkait dengan program Perhutanan Sosial, maka dibentuklah Strengthening Of Social Forestry (SSF) Project Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat dan mendorong penguatan Program Perhutanan Sosial di Indonesia melalui penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari, serta memperkuat regulasi Program Perhutanan Sosial khususnya di wilayah Kota/Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Lampung Selatan, Kab. Halmahera Barat, dan Kab. Lima Puluh Kota yang dijadikan 5 areal kerja SSF Project Indonesia.

Dalam pelaksanaannya dalam mencapai target, SSF Project Indonesia melibatkan Pendamping Masyarakat/Field Facilitator yang menjadi kunci dalam proses pendampingan. Namun, tentunya banyak kendala yang dihadapi oleh para Pendamping Masyarakat dalam melakukan pendekatan komunikasi untuk meyakinkan masyarakat setempat sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti. Dengan adanya pendampingan pada masyarakat diharapkan masyarakat mampu mengorganisasikan dirinya/kelompoknya dalam mengusulkan dan memperoleh izin hak kelola, meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan, kesadaran serta kemandiriannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pendampingan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat yang diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses atau upaya untuk membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Mendeskripsikan alasan serta peranan pendamping masyarakat pada 5 areal kerja SSF Project Indonesia.
2. Mendeskripsikan tujuan para pendamping masyarakat dalam melakukan komunikasi pemberdayaan di 5 areal kerja SSF Project Indonesia.
3. Menguraikan proses komunikasi pemberdayaan & pendampingan masyarakat pada pendamping masyarakat di 5 areal kerja SSF Project Indonesia.
4. Mengidentifikasi faktor penghambat pada komunikasi yang dilakukan oleh para pendamping masyarakat di 5 areal kerja SSF Project Indonesia.
5. Menguraikan solusi para pendamping masyarakat dalam mengatasi kendala yang terjadi di 5 areal kerja SSF Project Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta menggunakan paradigma konstruktivis. Jenis penelitian ini adalah studi kasus deskriptif yang termasuk ke dalam single case study, berfokus pada deskripsi suatu proses atau rangkaian kejadian-kejadian pada perilaku individu Strengthening Of Social Forestry (SSF) Project Indonesia. Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara, studi pustaka & dokumentasi. Subjek penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling, yakni pihak Direktorat PKPS, Team Leader SSF Project Indonesia, dan perwakilan

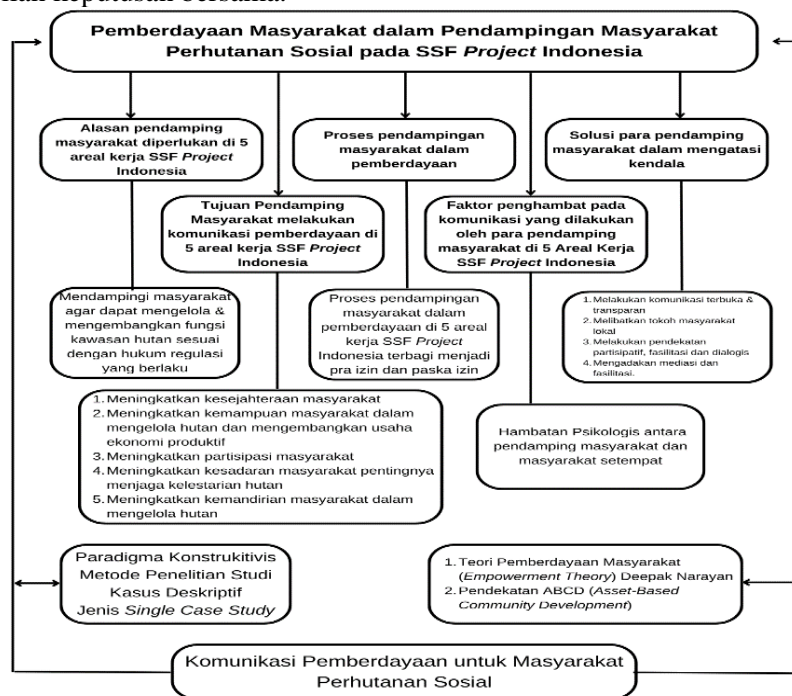
Pendamping Masyarakat di 5 areal kerja SSF Project Indonesia. Analisis data kualitatif menggunakan Model Interaktif dari Miles dan Huberman, yakni "a cycle model in the form of interactive model, consisting data collection, data reduction, data display, and conclusion steps (Chaerowati & Subandy, 2019: 2)", sehingga meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perhutanan Sosial merupakan implementasi dari model pengelolaan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang diharapkan mampu mengubah tata kelola hutan menjadi model kelola bersama masyarakat yang dapat memberikan jaminan bagi kelestarian sumber daya hutan. Strengthening Of Social Forestry (SSF) Project Indonesia merupakan upaya dalam rangka mendukung, membantu, dan mempercepat pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Indonesia dalam memberikan akses kelola hutan seluas 12,7 juta hektar. Dalam mencapai tujuan Perhutanan Sosial dan target SSF Project Indonesia, dibutuhkan pendampingan terhadap masyarakat baik pada tahap pra persetujuan maupun paska persetujuan akses kelola kawasan Perhutanan Sosial. Keberadaan Pendamping Masyarakat SSF Project Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat penerima akses kelola Perhutanan Sosial yang berperan sebagai pendorong, penggerak, motivator, katalisator, dan fasilitator dalam mencapai target Perhutanan Sosial.

Pada penelitian ini, Teori Komunikasi Pemberdayaan dari Deepak Narayan diterapkan dalam proses pendampingan masyarakat perhutanan sosial di 5 areal kerja SSF Project Indonesia. Teori ini menekankan dialog partisipatif, ruang publik inklusif, dan kapasitas komunikatif, yang sejalan dengan tujuan pendampingan untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. (Suuib, 2023)

Melalui dialog partisipatif, masyarakat didorong untuk menyuarakan pendapat, pengalaman, dan aspirasinya terkait Perhutanan Sosial. Pendamping masyarakat SSF Project Indonesia memfasilitasi FGD, musyawarah, dan memperkuat kelembagaan masyarakat seperti KTH sebagai wadah dialog dan partisipasi. Ruang publik inklusif dibentuk di desa-desa, seperti balai desa, taman desa, atau ruang terbuka lainnya, untuk memfasilitasi pertukaran informasi, diskusi, dan pengambilan keputusan bersama.



Gambar 1. Hasil Temuan Penelitian Secara Keseluruhan

Penerapan Teori Komunikasi Pemberdayaan Narayan pada pendampingan masyarakat SSF Project Indonesia diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kawasan Perhutanan Sosial, memperkuat kelembagaan masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan sumber daya, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berkomunikasi dan bernegosiasi, serta mewujudkan pengelolaan hutan sosial yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendamping masyarakat SSF Project Indonesia harus bekerja sama dengan masyarakat, serta memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya agar program pendampingan dapat berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuannya.

Sedangkan pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* merupakan pendekatan pembangunan masyarakat di mana berfokus pada kekuatan, potensi, dan aset yang dimiliki komunitas juga diterapkan pada pelaksanaan pendampingan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada identifikasi, pemetaan, dan mobilisasi aset-aset untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Komunikasi pemberdayaan masyarakat Perhutanan Sosial merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial. Komunikasi pemberdayaan masyarakat Perhutanan Sosial menjadi elemen penting dalam SSF Project Indonesia untuk memastikan bahwa masyarakat memahami hak, kewajiban, dan manfaat mereka dalam pengelolaan hutan sosial.

Alasan serta Peranan Pendamping Masyarakat Dibutuhkan di 5 Areal Kerja SSF Project Indonesia

Strengthening Of Social Forestry (SSF) Project Indonesia merupakan upaya dalam rangka mendukung, membantu, dan mempercepat pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Indonesia melalui penguatan kapasitas masyarakat, organisasi, maupun kelembagaan untuk mengimplementasikan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dengan menegakkan hukum yang sesuai dengan Program Perhutanan Sosial. Dalam mencapai target SSF Project Indonesia, dibutuhkan pendampingan terhadap masyarakat baik tahap pra persetujuan maupun pasca persetujuan akses kelola kawasan Perhutanan Sosial. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang Program Perhutanan Sosial dan manfaat program tersebut bagi mereka. Pendamping masyarakat dapat membantu menjelaskan program ini kepada masyarakat dan membantu mereka untuk memahami bagaimana program ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan perekonomian & kesejahteraan untuk kedepannya. Dengan adanya peran Pendamping Masyarakat SSF Project Indonesia, tentunya dapat menjembatani masyarakat dalam memperoleh hak kelola akses lahan Perhutanan Sosial. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan juga seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya, seperti modal, teknologi, dan pelatihan. Pendamping masyarakat dapat membantu masyarakat dalam mengakses sumber daya ini sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola hutan. Alasan utama pendamping masyarakat diperlukan di 5 areal kerja SSF Project Indonesia yaitu, untuk mendampingi masyarakat agar dapat mengelola & mengembangkan fungsi kawasan hutan sesuai dengan hukum regulasi yang berlaku. Keberadaan pendamping sangat dibutuhkan oleh masyarakat penerima akses kelola Perhutanan Sosial yang berperan penting sebagai pendorong, penggerak, motivator, mediator, katalisator, dan fasilitator dalam mencapai target Perhutanan Sosial. Pendampingan dapat dilakukan oleh tenaga penyuluh, bakti rimbawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), local champions, dan akademisi.

Tujuan Para Pendamping Masyarakat dalam Melakukan Komunikasi Pemberdayaan di 5 Areal Kerja SSF Project Indonesia

Tujuan para pendamping masyarakat dalam melakukan komunikasi pemberdayaan di 5 areal kerja SSF Project Indonesia yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pendamping masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dalam membuka akses ekonomi melalui pengelolaan hutan secara legal dengan melalui pembagian kawasan hutan menjadi 4 skema Perhutanan Sosial yaitu, Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Pada pendampingan tahap awal, SSF Project Indonesia membantu

masyarakat dalam meningkatkan pendampingan pengembangan pengelolaan kawasan hutan & lingkungan, pendampingan akses permodalan, pendampingan akses pasar, pendampingan pengelolaan pengetahuan, serta pendampingan pemantauan & evaluasi. Di sisi lain, pendamping masyarakat ikut serta dalam memperkuat kelembagaan masyarakat agar lebih mandiri dan berkelanjutan dalam mengelola kawasan hutan, khususnya di wilayah Kota/Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Halmahera Barat, Kab. Lampung Selatan, dan Kab. Lima Puluh Kota.

2. **Meningkatkan Kemampuan Masyarakat**
SSF Project Indonesia menyediakan pelatihan dan pembinaan yang dibantu para pendamping masyarakat di setiap areal kerjanya dalam pengelolaan hutan lestari & pengembangan usaha. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan karena pendamping masyarakat juga mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis hutan, seperti ekowisata, agroforestri, dan pengolahan hasil hutan non kayu. Oleh karena itu, pentingnya dalam meningkatkan keterampilan serta kemampuan pada masyarakat setempat guna memberikan pengetahuan tentang Perhutanan Sosial, hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam mengelola kawasan hutan.
3. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan terkait Program Perhutanan Sosial**
Partisipasi masyarakat menjadi hal yang esensial, masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan dan Program Perhutanan Sosial. Pendamping SSF Project Indonesia pun menyadarkan masyarakat secara perlahan tentang pentingnya kelestarian hutan dan manfaat Program Perhutanan Sosial dengan adanya pendekatan partisipatif, fasilitasi dan dialogis bersama masyarakat.
4. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Menjaga Kelestarian Hutan**
Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan merupakan langkah krusial dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Para Pendamping Masyarakat SSF Project Indonesia melakukan edukasi & sosialisasi terkait Program Perhutanan Sosial dengan mengadakan penyuluhan, melibatkan tokoh masyarakat setempat, dan melakukan pendampingan secara intensif dengan masyarakat di 5 areal kerja SSF Project Indonesia.
5. **Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Setempat dalam Mengelola Hutan.**
Hingga akhirnya, tujuan akhir dari adanya komunikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh para pendamping masyarakat di 5 areal kerja SSF Project Indonesia ini adalah meningkatkan kemandirian masyarakat. Diharapkan untuk kedepannya masyarakat mampu mengelola hutan secara mandiri dan bertanggung jawab, mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Proses Pendampingan Masyarakat dalam Pemberdayaan di 5 Areal Kerja SSF Project Indonesia

Proses pendampingan masyarakat dalam pemberdayaan di 5 areal kerja SSF Project Indonesia terbagi menjadi pra persetujuan dan pasca persetujuan. Pada proses pendampingan ini tentu saja terdapat komunikasi pemberdayaan di dalamnya, di mana pendamping masyarakat mendorong masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka dalam mengelola hutan dan mengembangkan usaha ekonomi dengan produktif. Namun dalam prosesnya, terdapat pula proses komunikasi lainnya yang berjalan dengan adanya pendampingan ini, yakni:

1. **Komunikasi Interpersonal**
Pada komunikasi interpersonal, pendamping menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat di 5 areal kerja SSF Project Indonesia, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti kunjungan rumah, pertemuan kelompok, dan pendampingan langsung di lapangan. Komunikasi interpersonal yang dilakukan memungkinkan pendamping untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan masyarakat dan memahami kebutuhan mereka secara lebih mendalam.

2. **Komunikasi Informatif**
Pada komunikasi informatif, pendamping masyarakat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat tentang Program Perhutanan Sosial, hak-hak dan tanggung jawab mereka, serta peluang-peluang yang tersedia dengan mengikuti program.
3. **Komunikasi Kelompok**
Komunikasi kelompok juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman. Pada proses pendampingan masyarakat dalam pemberdayaan di 5 areal kerja SSF Project Indonesia, pendamping menyelenggarakan berbagai kegiatan kelompok, seperti pelatihan dengan berbagai pihak, workshop, dan diskusi. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan hutan, ekonomi, dan organisasi.
4. **Komunikasi Partisipatif**
Pada komunikasi partisipatif, pendamping masyarakat SSF Project Indonesia mendorong masyarakat untuk aktif dalam proses komunikasi. Hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi Program Perhutanan Sosial. Komunikasi partisipatif memungkinkan masyarakat untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap program ini dan meningkatkan partisipasi mereka dalam program ini.
5. **Komunikasi Fasilitatif**
Pada komunikasi fasilitatif, pendamping masyarakat memfasilitasi komunikasi dan dialog antar berbagai pihak yang terlibat dalam Program Perhutanan Sosial, seperti masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi lainnya.

Faktor Penghambat pada Komunikasi yang Dilakukan oleh Para Pendamping Masyarakat di 5 Areal Kerja SSF Indonesia

Faktor penghambat pada komunikasi yang dilakukan oleh para pendamping masyarakat di lapangan yaitu ada pada

1. **Hambatan Proses Kegiatan Pendampingan Masyarakat**
Hambatan yang terjadi pada saat kegiatan pendampingan berlangsung cukup beragam di tiap wilayahnya. Banyaknya desa yang dipegang oleh satu pendamping masyarakat cukup menjadi hambatan karena masyarakat menilai pendampingan kurang intensif melihat dari banyaknya warga yang antusias untuk berinteraksi lebih sering lagi dengan para pendamping. Namun ternyata hambatan pun terasa pada pendamping masyarakat di wilayah Kab. Halmahera Barat yang kesulitan dalam mengakses masyarakat dikarenakan tidak adanya transportasi umum dan jarak dari satu desa ke desa lainnya cukup jauh.
2. **Hambatan Psikologis pada Komunikasi Pemberdayaan**
Hambatan psikologis pun menjadi salah satu hambatan pada komunikasi yang terjadi di lapangan. Kurangnya pendekatan terlebih dahulu dengan warga ketika di awal project sehingga membuat banyak masyarakat yang menolak dalam mengikuti Program Perhutanan Sosial di awal proses pendampingan ini. Adapun hambatan komunikasi yang terjadi disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu/masyarakat yang berfikir dengan adanya Program Perhutanan Sosial ini kawasan hutan yang sudah menjadi mata pencaharian warga akan direbut atau diambil alih oleh pemerintah. Perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu tentunya dapat menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi terhadap sesuatu.

Solusi Para Pendamping Masyarakat dalam Mengatasi Kendala Komunikasi di 5 Areal Kerja SSF Project Indonesia

Solusi para pendamping masyarakat dalam mengatasi kendala komunikasi di 5 areal kerja SSF Project Indonesia yaitu dengan melakukan komunikasi terbuka & transparan, melibatkan tokoh masyarakat lokal, melakukan pendekatan partisipatif, fasilitasi dan dialogis, serta mengadakan mediasi. Layaknya di Kab. Lampung Selatan mereka menyebutnya dengan Urun Rembuk yang artinya bermusyawarah atau memberikan sumbang saran pada proses pendampingan ini.

Sedangkan solusi pada hambatan proses kegiatan pendampingan masyarakat yaitu, para pendamping masyarakat yang kesulitan untuk mengakses wilayah-wilayah yang memang tidak memungkinkan seperti tidak adanya kendaraan umum, bisa melakukan proposal pengadaan barang untuk pengadaan transportasi di lapangan seperti sepeda motor misalnya. Selain itu juga untuk hambatan yang dikarenakan satu pendamping masyarakat memegang beberapa desa sehingga kegiatan pendampingan dirasa kurang intensif, pihak Direktorat PKPS atau SSF Project Indonesia bisa mempertimbangkan kembali agar menambah jumlah pendamping masyarakat di tiap wilayah areal kerjanya.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan hambatan komunikasi dalam pendampingan masyarakat SSF Project Indonesia dapat diatasi. Komunikasi yang efektif dan berkualitas akan meningkatkan partisipasi masyarakat, memperlancar pelaksanaan program, dan mencapai tujuan SSF Project Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan hutan. Keberhasilan program pendampingan masyarakat dalam Strengthening of Social Forestry (SSF) Project Indonesia sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara tim pendamping, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, dalam waktu yang bersamaan berbagai kendala dan hambatan juga memberikan pembelajaran yang berarti dan bermanfaat bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan proyek, maupun sebagai umpan balik bagi upaya pengembangan program Perhutanan Sosial di masa yang akan datang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Diperoleh sebuah kesimpulan bahwa alasan utama pendamping masyarakat diperlukan di 5 areal kerja SSF Project Indonesia yaitu untuk mendampingi masyarakat agar dapat mengelola & mengembangkan fungsi kawasan hutan sesuai dengan hukum regulasi yang berlaku;
2. Tujuan para pendamping masyarakat dalam melakukan komunikasi pemberdayaan di 5 areal kerja SSF Project Indonesia yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola hutan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif, meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait perhutanan sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan, serta meningkatkan kemandirian masyarakat setempat dalam mengelola hutan;
3. Proses pendampingan masyarakat dalam pemberdayaan di 5 areal kerja SSF Project Indonesia terbagi menjadi pra persetujuan dan pasca persetujuan. Proses komunikasi ini meliputi komunikasi interpersonal, komunikasi informatif, komunikasi kelompok, komunikasi fasilitatif, serta komunikasi pemberdayaan antara pendamping masyarakat dan masyarakatnya;
4. Faktor penghambat pada komunikasi yang dilakukan oleh para Pendamping Masyarakat SSF Project Indonesia di lapangan yaitu, hambatan pada kegiatan pendampingan masyarakat serta hambatan komunikasi psikologis antara pendamping masyarakat dan masyarakat setempat;
5. Solusi para pendamping masyarakat dalam mengatasi kendala di 5 areal kerja SSF Project Indonesia yaitu, dengan melakukan komunikasi terbuka & transparan, melibatkan tokoh masyarakat lokal, melakukan pendekatan partisipatif, fasilitasi dan dialogis, serta mengadakan mediasi dan fasilitasi.

Acknowledge

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, Riza Efendy & Ika Sartika atas doa dan dukungannya, terima kasih kepada Prof. Dr. Atie Rachmatie.Dra.,M.Si. dan juga kepada Ibu Dr. Ani Yuningsih Dra.,M.Si. yang telah membantu dalam keberlangsungan pengerjaan skripsi ini, serta terima kasih kepada Ibu Dr. Dede Lilis Chaerowati, S.Sos., M.Si. selaku dosen

pembimbing yang telah membimbing saya dan juga memberi arahan dalam skripsi ini. Tidak lupa kepada pihak Direktorat PKPS, SSF Project Indonesia, serta para informan terkait yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Chaerowati, Dede Lilis dan Ibrahim, Idi Subandy. 2019. *Utilization of information technology for sustainable rural development. Journal of Physics: Conference Series*, 1375 (2019) 012058: 1-6.
- [2] Perhutanan Sosial. (n.d.). Menlhk.Go.Id. Retrieved June 23, 2024, from <https://pkps.menlhk.go.id/>
- [3] Suaib. 2023. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Adab Indramayu.
- [4] Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- [5] Tawulo, M. A. (n.d.). *Fasilitator dalam Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*. Neliti.com.
- [6] N. Z. Darajat and N. Yulianti, “Pengelolaan Media Sosial Instagram dalam Gerakan Aksi Kemanusiaan dan Pendidikan,” *Jurnal Riset Public Relations*, vol. 4, no. 1, pp. 65–70, 2024, doi: 10.29313/jrpr.v4i1.3898.
- [7] Agung Setiawan and Maman Suherman, “Implementasi CSR PT X dalam Membangun Ketahanan Pakan Ternak,” *Jurnal Riset Public Relations*, pp. 33–40, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrpr.v3i1.1955.
- [8] Muhammad Akbar Wiradhika Utama and Sophia Novita, “Strategi Komunikasi Pemasaran TIC Kota Bandung sebagai Sarana Informasi Pariwisata di Instagram,” *Jurnal Riset Public Relations*, pp. 55–60, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrpr.v3i1.1996.